

DEMOKRASI: KONSEPSI DAN PRAKTIK

Sebuah Tinjauan Sosiologi Politik tentang Perkembangan Demokrasi dan Negara-Bangsa Indonesia

Daniel Sparringa

Pendahuluan

Tulisan ini mencoba membahas bagaimana demokrasi sebagai sebuah konsepsi yang mengalami perkembangan sejarah yang amat kompleks itu dipahami dalam perspektif sosiologis. Di samping persoalan-persoalan yang menyangkut struktur dan budaya, demokrasi sering mendapatkan interpretasi yang bersifat lokal dan partikular yang tidak jarang malah menyingkirkan elemen-elemen yang bersifat universal. Praktik demokrasi Orde Baru diangkat sebagai kasus dan sekaligus pijakan untuk melihat kemungkinan mengembangkan sebuah wacana dan praktik demokrasi yang lebih masuk akal bagi sebuah eksistensi negara-bangsa Indonesia.

Pemahaman demokrasi sebagai sebuah proses, di samping mengisyaratkan pentingnya usaha untuk membangun lembaga-lembaga politik juga mengabarkan pentingnya masyarakat pada umumnya dan elite politik pada khususnya mengembangkan kesadaran-kesadaran politik yang memungkinkan interaksi di antara elemen-elemen demokrasi berlangsung secara konstruktif. Secara keseluruhan, tulisan ini dihasratkan mencakup isu-isu strategis yang

kemungkinannya untuk menghadirkan sebuah masa depan Indonesia yang lebih menjanjikan berikut berbagai tantangan dan risikonya.

Pada akhirnya, melalui tulisan ini, saya ingin menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah merupakan satu-satunya isu strategis dalam transisi di Indonesia. Kebutuhan untuk membuat reposisi yang produktif atas perubahan di tingkat nasional dan global adalah isu strategis lain yang menuntut sebuah respon baru yang lebih masuk akal untuk memungkinkan gagasan-gagasan besar tentang negara-bangsa, demokrasi, dan globalisasi itu menghasilkan sebuah konsepsi politik yang lebih sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Demokrasi sebagai Pengalaman Kultural

Sejak tiga dekade terakhir dunia menyaksikan kemajuan yang luar biasa dalam perkembangan demokrasi. Sejak 1972 jumlah negara yang mengadopsi sistem politik demokrasi telah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 44 menjadi 107 (McColm, 1993). Dari 187 negara saat ini di dunia, lebih dari 58 persen di antaranya mengadopsi pemerintahan demokratis, masing-masing dengan variasi sistem politik tertentu.

setelah jatuhnya pemerintahan komunis di akhir tahun 80-an dan karenanya telah menjadikan demokrasi sebagai "satu-satunya alternatif yang sah terhadap berbagai bentuk rejim otoritarian" (Sin, 1994). Secara sosiologis mungkin ini merupakan salah satu perubahan terpenting yang menandai tahun-tahun akhir milineum kedua; sebuah perkembangan yang oleh Huntington dikonseptualisasikan sebagai "gelombang ketiga demokratisasi" (Huntington, 1991).

Secara konseptual, pembangunan demokrasi di sebuah negara tidak lagi dilihat sebagai hasil-hasil dari tingkat modernisasi yang lebih tinggi sebagaimana ditunjukkan melalui indikator-indikator kemakmuran, struktur klas borjuasi, dan independensi ekonomi dari aktor-aktor eksternal. Melainkan, lebih dilihat sebagai hasil dari interaksi-interaksi dan pengaturan-pengaturan strategis di antara para elite, pilihan-pilihan sadar atas berbagai bentuk konstitusi demokratis, dan sistem-sistem pemilihan umum dan kepartaian (Karl, 1994). Pemikiran ini didasarkan pada argumentasi sentral bahwa pengalaman Barat tentang demokrasi tidak akan dapat diulang dengan arah yang sama di negara-negara sedang berkembang.¹

Sebagai sebuah konsep teoritis maupun politis, demokrasi jelas sekali terikat oleh faktor-faktor kesejarahan

yang terjadi di Eropa sepanjang abad-17 hingga 19. Prosesnya sendiri telah dimulai pada abad pertengahan ketika dunia, khususnya Eropa, dilanda reformasi, dan kemudian revolusi sosial. Reformasi intelektual yang mengubah Eropa, dan kemudian dunia, merupakan proses sosial dan sejarah yang amat panjang, bahkan prinsip-prinsip dasarnya mungkin telah diawali dengan diperkenalkannya institusi modern yang disebut dengan universitas (Sin, 1994: 139). Dalam buku klasiknya yang terkenal itu, *The Triumph of Science and Reason*, Nussbaum (1983) dengan jelas memberikan ilustrasi sejarah tentang bagaimana masyarakat modern Eropa digerakkan oleh berbagai kekuatan yang saling berkaitan. Dalam hal demikian itu, Nussbaum menyebut faktor-faktor seperti surutnya monopoli institusi gereja, kemudian negara, dalam mengontrol 'kebenaran' (yang memberi arti penting bagi diletakkannya tradisi berpikir bebas yang menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad-abad selanjutnya), dan mulai surutnya masyarakat feodal di akhir abad ketujuhbelas, sebagai sejarah yang sangat penting dalam menentukan perkembangan sosial, seperti, parlementarisme dan pengakuan terhadap *civil liberties*.

Sampai dengan tahun 60-an dan 70-an, penelitian-penelitian tentang demokrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil kerja dari Lipset (1959), Almond dan Verba (1989), dan Huntington

¹ Banyak perspektif yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Lihat misalnya: Blaney and Pasha (1994); dan Huntington

O'Donnell (1979), banyak didominasi oleh upaya untuk menemukan kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan guna munculnya sebuah demokrasi yang stabil (Sin, 1994: 139). Dalam perkembangannya sampai dengan dekade lalu, studi tentang demokrasi diwarnai terutama oleh upaya untuk memahami dinamika dari transisi demokratis dan konsolidasi (Ackerman, 1992). Hanya dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi pergeseran arah studi mengenai demokrasi. Penelitian belakangan ini memfokuskan perhatiannya pada peran para pemimpin politik dan elite strategis lainnya dalam proses demokrasi.

Dalam hal ini, banyak para ahli ilmu sosial dewasa ini cenderung untuk berpikir bahwa transisi menuju demokrasi, khususnya di negara-negara sedang berkembang, jarang sekali merupakan hasil dari faktor-faktor yang digerakkan oleh tindakan-tindakan politik massa (Pinkney, 1994). Dengan kata lain, kesuksesan dalam proses perubahan dan konsolidasi menuju demokrasi lebih banyak ditentukan oleh para elite politik (Huntington, 1984 dan Liz, 1990)², di samping perkembangan politik yang berlangsung di tingkat

global dan internasional (Remmer, 1995, dan Uhlin, 2003). Beberapa bahkan berargumentasi bahwa sesungguhnya demokrasi semestinya diperlakukan sebagai suatu hasil yang dapat direkayasa secara sosial sepanjang terdapat *craftsmanship* di kalangan para elite politik (Palma, 1991). Cara pandang semacam ini jelas menolak argumentasi yang menganggap bahwa demokrasi tak dapat ditranplantasikan di tanah asing, di luar konteks sosial dan budaya di mana demokrasi itu pada awalnya dikembangkan.³

Mengikuti argumentasi ini, tulisan ini mengambil posisi teoretis yang mengasumsikan bahwa pada dasarnya perubahan menuju demokrasi di Indonesia akan menjadi lebih *feasible* apabila para elite politik Indonesia sebagai agen perubahan sosial memiliki peralatan-peralatan teoretis yang memadai untuk memahami dan terlibat dalam proses-proses transisi demokrasi. Ini berarti, faktor-faktor yang berhubungan dengan budaya dan struktur politik tidak dilihat sebagai struktur operasional yang konstan dan stabil, melainkan dilihat sebagai arena diskursus yang dinamis yang melibatkan proses-proses konstruksi dan dekonstruksi dari para individu sebagai agen, khususnya para elitnya (Etzioni-Halevy, 1993), daripada

² Dalam pemikiran yang lebih mutakhir, beberapa kalangan juga menyertakan perkembangan di lingkungan elemen-elemen strategis dalam *civil society* sebagai prasyarat bagi sebuah demokrasi yang lebih

³ Lihat misalnya penelitian Brzezinski

semata-mata sebagai representasi dari struktur (Birch, 1993).⁴

Bukti-bukti empiris terhadap kecenderungan semacam ini sebenarnya dapat dilihat dari makin meluasnya gerakan-gerakan oposisi di Indonesia yang mulai marak pada awal tahun 90-an yang pada dasarnya digerakkan oleh elite dari berbagai golongan, misalnya intelektual, mahasiswa, buruh, dan LSM, daripada oleh kekuatan-kekuatan yang secara langsung tumbuh dari massa (Sparringa, 1997a; Heryanto, 1996; Pabotinggi, 1995). Ini tidak berarti bahwa saya mengartikan tidak terdapat masalah yang serius dalam hal itu. Perbedaan yang besar di antara diskursus resmi dan diskursus alternatif tentang bagaimana demokrasi itu dikonstruksikan merupakan satu persoalan besar yang menghadang masa depan demokrasi di Indonesia.

Dalam uraian-uraian berikut ini, saya mencoba memfokuskan perhatian pada isu tentang bagaimana format politik yang berkembang selama Orde Baru ini menghasilkan pemahaman budaya politik yang khas yang ditandai oleh hadirnya interpretasi resmi atas demokrasi pancasila sebagai basis legitimasi spiritual dan pembangunan sebagai basis legitimasi material (Sparringa, 1997a).

Pemikiran Dasar Orde Baru tentang Demokrasi

Orde Baru memotret Indonesia sebagai aglomerasi kelompok yang secara etnis maupun kultural sangat beragam dan yang dengan bangga diproklamasikan sebagai bangsa yang sedang membangun menurut cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sejak awalnya, Orde Baru dengan giat mempromosikan pentingnya Pancasila, baik sebagai ideologi negara maupun sebagai basis kehidupan seluruh warganya.⁵ Salah satu argumentasi terpenting yang dikembangkan oleh Orde Baru tentang Pancasila sebagai dasar negara adalah ditekankannya dogma sentral bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sesuai dengan "ciri dan kepribadian bangsa". Dengan kata lain, sebuah ideologi yang mengalami kristalisasi selama berabad-abad dari bumi Indonesia sendiri dan yang kemudian dikembangkan selama masa pergerakan nasional dan revolusi.⁶

Dalam hal demokrasi, landasan terpenting yang dipakai untuk menjelaskan demokrasi yang berasal dari bumi sendiri, yaitu Demokrasi Pancasila, terletak pada sila keempat Pancasila ("Kerakyatan yang dipimpin

⁵ Uraian yang cukup menyeluruh tentang promosi Presiden Soeharto pada tahun-tahun awalnya dalam masalah ini, misalnya, dapat dilihat dalam CSIS (1976).

⁶ Interpretasi semacam ini jelas menolak klaim bahwa Pancasila ditemukan oleh Soekarno. Lihat misalnya, uraian 114-51

⁴ Dryzek dan Berejikian (2004), mengkonstruksikan pemikiran ini dalam *Transconstructive*

oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"). Terdapat sekurang-kurangnya beberapa dogma dasar yang secara tersirat maupun tersurat terkandung dalam diskursus resmi Orde Baru tentang demokrasi ini. *Pertama*, prinsip "musyawarah untuk mencapai kata mufakat" merupakan landasan unik dan spesifik yang terdapat dalam demokrasi Indonesia. *Kedua*, prinsip "musyawarah/mufakat" itu mencerminkan apa yang dipercaya sebagai landasan ideal yang bersumber dari semangat gotong-royong dan kekeluargaan yang dianggap sebagai cerminan sejati dari budaya politik Indonesia. *Ketiga*, dengan ciri "gotong royong dan kekeluargaan" ini, Demokrasi Pancasila menolak pemikiran yang dikembangkan dalam demokrasi liberal Barat yang menempatkan kepentingan individu sebagai isu sentral. Di luar itu, adalah penolakan yang tegas terhadap format politik yang menempatkan oposisi dan konflik sebagai bagian dari persaingan politik.

Interpretasi atas demokrasi semacam itu jelas tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Soepomo tentang negara integralistik. Secara singkat, Soepomo mengidealkan adanya persekutuan sempurna di antara pemimpin dan yang dipimpin—sebuah persekutuan spiritual yang diikat oleh semangat kekeluargaan (Bouchier, 1996 dan Soepomo, 1990). Sebuah integrasi total di antara negara dan masyarakat yang mengutamakan keserasian, keselarasan dan kesim-

bangun. Konsep integralisme Soepomo ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjelaskan bangunan dasar dari budaya politik yang dikembangkan oleh Orde Baru selama awal hingga akhir pemerintahannya.

Kebutuhan untuk membangun moralitas politik semacam ini menjadi mendesak setelah Orde Baru pada tahun-tahun awalnya mencoba membangun sebuah format politik yang sangat kontras dari format politik yang berkembang sebelumnya: Demokrasi Liberal 1950-an dan Demokrasi Terpimpin 1960-an. Legitimasi politik menjadi sebuah proyek besar yang secara sadar dibangun oleh Orde Baru dalam dua dekade pertama kekuasaannya. Walaupun demikian, diperlukan penjelasan yang sedikit banyak menyinggung perkembangan sejarah politik sebelumnya untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang cukup memuaskan.

Perkembangan Diskursus Resmi Orde Baru tentang Demokrasi: Negara Mengambang dan Hegemoni

Walaupun hingga paruh 90-an jumlah klas borjuis bumiputera telah makin meningkat dibandingkan masa sebelumnya, saya sendiri agak sulit untuk menerima klaim bahwa telah hadir klas menengah bumiputera⁷ yang sesungguhnya karena satu

⁷ Secara sengaja saya menghindarkan penyebutan istilah pribumi karena konotasi rasisme yang terkandung dalam istilah itu; akan gantinya saya menggunakan istilah bumiputera yang lebih bebas dari konotasi

alasan penting. Sebagian besar dari mereka bukan bertumbuh atas kekuatan sendiri—satu syarat penting dalam pertumbuhan kelas borjuis di Barat—melainkan terutama karena bantuan fasilitas pemerintah. Dapat diperkirakan sebelumnya bahwa kelas semacam ini tidak mampu mengembangkan garis politiknya sendiri karena ketergantungan yang luar biasa pada negara⁸—sebuah keadaan yang menyulitkan berkembangnya kekuatan-kekuatan sosial yang nyata dalam masyarakat.

Ketiadaan kekuatan yang nyata dalam *civil society*⁹ sesungguhnya merupakan fenomena umum sejarah politik Indonesia. Secara ekstrim bahkan dapat dikatakan bahwa, negara (*state*) lebih dulu hadir sebelum masyarakat (*civil society*)—

sesuatu yang sangat janggal jika dibandingkan dengan sejarah lahirnya negara di masyarakat Barat. Walaupun terjadi variasi intensitas yang menjelaskan pertumbuhan *civil society* di Indonesia (cukup menonjol di tahun 1950-an, surut dalam era Demokrasi Terpimpin, dan kemudian melemah dalam awal Orde Baru), secara umum dapat dikatakan bahwa Negara merupakan unsur dominan dalam perkembangan itu (Bandingkan dengan Bernhard (1993). Fenomena ini sangat menonjol dalam era Orde Baru yang lahir segera setelah runtuhnya rejim Soekarno.

Segera setelah berkuasa, Orde Baru secara sistematis melakukan pelemahan elemen-elemen penting yang menjadi basis dari 'politik massa' dan 'politik aliran'—sebuah politik yang dalam berbagai kesempatan sering saya sebut dengan politik 'depolitisasi politik massa' (*depoliticization of mass politics*) (Sparringa, 1997b dan 1997c). Langkah ini segera disusul dengan penyederhanaan partai di awal 1970-an, penerbitan lima Undang-undang Politik termasuk penetapan Pancasila sebagai 'satu-satunya asas' pada pertengahan 1980-an. Apa yang dilakukan Orde Baru sebenarnya tidak saja mempersempit 'ruang gerak' tetapi juga 'ruang diskursus' politik.

Orde Baru memang merupakan sebuah kontras terhadap rejim-rejim sebelumnya: 'Demokrasi Liberal' (1950-1959) dan 'Demokrasi Terpimpin' (1959-1965). Orde Baru

⁸ Van Niel (1984), misalnya, percaya bahwa kata 'kelas menengah' yang beriak di Indonesia sebenarnya merujuk pada kelompok-kelompok berpenghasilan menengah yang terdiri atas administrator, guru / dosen, manajer, dokter, penasehat hukum dan kelompok profesional lainnya.

⁹ Secara sadar saya memang memilih istilah *civil society* di tengah perdebatan intelektual di Indonesia belakangan ini tentang adakah istilah masyarakat madani itu dapat dianggap menjadi istilah pengganti untuk *civil society*. Keengganan saya untuk memasuki area itu bukan terletak pada masalah semantik tetapi pada isu di sekitar pertanyaan tentang adakah rujukan sejarah yang kerap dipakai oleh eksponen penggagas istilah itu memang sungguh mencerminkan ciri yang hakiki yang diwakili oleh konsep *civil society* sebagaimana ditemukan dalam teks sosiologi pada khususnya dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Lihat juga Roberts,

bangun citra dirinya melalui pendefinisian secara diametral terhadap rejim-rejim itu: kestabilan politik—dilawankan dengan *chaos* yang dianggap menjadi ciri menonjol Demokrasi Liberal (misalnya jatuh banggunya pemerintah yang kadang hanya berumur 3 bulan); konstitusional—dilawankan dengan apa yang dianggap sebagai penyelewengan Pancasila dan UUD45 (misalnya, Nasakom, presiden seumur hidup di masa Demokrasi Terpimpin, dan sistem pemerintahan parlementer di masa Demokrasi Liberal); pembangunan—dilawankan dengan kemunduran ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin (misalnya, inflasi yang mencapai 800%), dan sebagainya. Jargon “Politik, *NO!*; Pembangunan, *YES!*” yang sangat populer di pertengahan 1970-an itu merupakan contoh yang baik untuk menggambarkan usaha Orde Baru membangun citra dirinya sebagai ‘Orde Pembangunan’ (Heryanto, 1988 dan 1996; van Langenberg, 1990 dan 1996).

Apabila ‘politik massa’ dan ‘politik aliran’ menjadi ciri yang dilekatkan pada rejim-rejim sebelumnya, Orde Baru tampil dengan format politik yang sama sekali berbeda, yang menjadi kontrasnya: sebuah **negara mengambang**. Sebuah negara yang mempresentasikan dirinya sebagai wakil sejati dari seluruh kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Sebuah negara yang otonom terhadap persaingan kepentingan yang

berkembang dalam masyarakat. Sebuah negara yang mengharamkan politik massa dan politik aliran yang tumbuh dan berakar pada kekuatan-kekuatan nyata dalam masyarakat. Sebuah negara yang dalam perkembangannya juga telah melahirkan ‘turunan-turunan’ baru yang serba mengambang: elite mengambang, partai mengambang, ormas mengambang, pers mengambang, dan intelektual mengambang. Bagi saya, yang mengambang bukan massa (yang dalam konsep resmi Orde Baru disebut dengan ‘floating mass’, tetapi negara.¹⁰

Saya sendiri agak keberatan menyamakan sepenuhnya konsep negara otonom ini dengan negara mengambang terutama karena dalam kenyataannya Orde Baru juga memasukkan pemikiran Soepomo tentang ‘negara integral’ yang mengandaikan persekutuan yang sempurna di antara pemimpin dan yang dipimpin. Sebuah konsep negara kekeluargaan yang dibayangkan menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia (Bouchier, 1997). Interpretasi Orde Baru atas pemikiran Soepomo dalam kenyataannya juga telah makin mengaburkan

¹⁰ Dalam teori-teori sosiologi tentang negara, konsep negara mengambang sangat dekat dengan konsep ‘negara otonom’ (*state autonomy*) yang rujukan empiriknya dapat ditemukan saat von Bismarck (1815-1898) menjadi pemimpin Jerman Raya (1871-1890). Konsep negara otonom yang awalnya

batas di antara negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*)—sebuah keadaan yang makin tidak menguntungkan bagi usaha memperkuat *civil society* yang memang sejak awalnya tidak pernah kuat. Sebuah kondisi yang dalam perkembangan di tahun-tahun berikutnya mengakibatkan berbagai hambatan struktural dan kultural bagi berkembangnya konsep dan praktik demokrasi yang lebih stabil.

Ketiadaan, atau lemahnya, basis struktural yang menopang demokrasi mengakibatkan suburnya interpretasi kultural yang memberikan legitimasi politik bahwa “demokrasi yang kita butuhkan memang unik dan spesifik”. Walaupun demikian, legitimasi demikian itu jelas kalau tidak datang begitu saja dari langit. Legitimasi harus dibangun atas dasar pengakuan rakyat. Menariknya, Orde Baru tidak melakukannya dengan mengeksploitasi nilai-nilai kultural semata namun juga memanfaatkan basis legitimasi materialisme melalui pembangunan ekonomi. Sebuah konsep yang dalam perkembangannya menjadi ideologi materialisme mendampingi ideologi spiritual yang diperolehnya dengan memanfaatkan interpretasi Soepomo dalam konteks struktural negara mengambang.

Sampai sebelum terjadinya krisis moneter, banyak kalangan mengakui bahwa Orde Baru memang telah mencapai banyak prestasi ekonomi yang patut mendapat pujian. Rata-

tahun berkuasa memang menakjubkan; rata-rata 7%, bahkan pernah mencapai 8-10% utamanya pada tahun-tahun dekade pertama. Saya sendiri tidak menampik kenyataan itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa Orde Baru sesungguhnya memang telah menjadikan pembangunan ekonomi sebagai basis utama bagi pembentukan legitimasi politik rakyat. Pembangunan (ekonomi), dengan kata lain, menjadi pilar legitimasi Orde Baru.

Tidak salah kalau disebut bahwa sesungguhnya Orde Baru ini tidak pernah menjanjikan yang lain-lainnya selain keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi menjadi ukuran paling penting untuk mengukur capaian dan karenanya juga legitimasi rejim ini di depan rakyat. Lihat saja, misalnya, pidato kenegaraan Presiden yang setiap tahunnya dilakukan di depan DPR itu. Hampir seluruhnya menyebutkan angka-angka yang mencerminkan prestasi di bidang itu. Walaupun terdapat angka-angka yang mencerminkan, misalnya, prestasi Orde Baru di sektor kesejahteraan sosial (dibangunnya rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya) itu pun dilihat sebagai akibat dari kemampuan ekonomi negara yang meningkat yang pada gilirannya telah memungkinkan negara menyisihkan sebagian anggarannya untuk itu. Demokrasi, memang tidak pernah menjadi bagian penting dalam manajemen politik janji Orde Baru.

Pembangunan sebagai ideologi sentral Orde Baru dalam kenyataannya telah membangunkan citra diri bangsa ini. Apa yang dilakukan oleh negeri ini di bawah Orde Baru seakan-akan hanya sah kalau mempunyai kaitan dengan yang satu itu: pembangunan. Kata "Pembangunan" itu sendiri bahkan telah menciptakan realitas sosial tersendiri yang "menyelimuti seluruh suasana kebatinan bangsa". Tidak berlebihan kiranya kalau disebut bahwa yang sesungguhnya menjadi asas tunggal negeri ini adalah 'pembangunan'. Banyak orang merasa tidak nyaman dengan suasana ini karena dalam kenyataannya realitas sosial ini telah mengurangi arti (devaluasi), menyingkirkan (marginalisasi) atau bahkan membungkamkan (*silencing*) banyak hal penting lainnya dan lebih penting dari itu: telah mengakibatkan kita menjadi tidak kritis lagi dengan makna dan proses-proses pembangunan. Sulit disangkal bahwa sebagai suatu konsep, pembangunan ekonomi sesungguhnya mempunyai banyak arti yang di dalamnya mengisyaratkan filsafat, asumsi dan model tertentu.

Arti 'Pembangunan' yang dipilih oleh Orde Baru ini pada dasarnya dapat dibayangkan seperti hal berikut ini: mekanisme pasar menjadi penentu utama dari kegiatan ekonomi dan yang diorientasikan pada pertumbuhan. Walaupun ciri ini merupakan hal umum yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis, harus dicatat bahwa negara

Orde Baru juga menjadi salah satu aktor ekonomi utama—satu ciri khusus yang pada umumnya tidak kita lihat di negara kapitalisme Barat. Adalah sebuah ironi bahwa apa yang kita capai dalam lapangan ekonomi selama ini harus dibayar dengan akibat tidak berkembangnya institusi sosial yang dalam sejarah kapitalisme moderen Barat itu justru menjadi penggerak utama dari ekonomi.

Orde Baru memang membayangkan sebuah paradigma pembangunan yang mempercayai infra struktur ekonomi pasar dapat berkembang tanpa sokongan infrastruktur sosial politik yang memfasilitasi perkembangan *civil society* yang kuat. Pandangan ini memang merupakan sebuah kontras terhadap pengalaman Barat yang memperlihatkan bahwa infrastruktur ekonomi dan politik tumbuh bersamaan: yang satu dianggap sebagai prasyarat yang lain. Sebaliknya, terdapat kepercayaan yang meluas di kalangan elite Orde Baru pada waktu itu bahwa perkembangan ekonomi pasar dapat disokong oleh infra-struktur politik lokal yang bersifat unik dan spesifik itu.

Dengan pola yang mirip, Orde Baru membangun konstruksi sosial yang amat khusus tentang demokrasi. Demokrasi dikonstruksikan dalam konteks interpretasi sejarah yang khusus, yakni sebagai sebuah pengaturan kehidupan bersama yang sandaran filosofisnya dilekatkan pada interpretasi Orde Baru mengenai ajaran Soepomo tentang "negara

integral(istik)". Apabila 'pembangunan' dijadikan sebagai basis legitimasi material maka Demokrasi Pancasila dipakai sebagai basis spritualnya. Kedua moralitas politik semacam itu memang hanya mungkin berkembang apabila negara relatif otonom terhadap kekuatan-kekuatan nyata yang berkembang dalam masyarakat. Negara mengambang pada kenyataannya memang telah memberikan basis yang ideal bagi tumbuhnya moralitas demokrasi yang memberi tempat penting pada interpretasi kultural sebagaimana telah diuraikan di depan tadi.

Mengikuti uraian-uraian sebelumnya jelas terkesan penolakan saya yang kuat terhadap penjelasan kultural yang membayangkan seakan-akan moralitas demokrasi itu tegak di atas landasannya sendiri. Itu berarti bahwa pemahaman terhadap budaya politik Orde Baru semestinya memperhatikan arena struktural yang berkembang selama kurun waktu itu. Interpretasi resmi atas Demokrasi Pancasila yang menegaskan prinsip bahwa demokrasi liberal Barat itu tidak cocok dengan budaya dan karakter nasional sudah sewajarnya dilihat dalam konteks struktural yang khas: negara mengambang. Negara mengambang memang tidak memungkinkan bertumbuhnya pemikiran politik yang memberi tempat sah bagi, misalnya, budaya oposisi dan konflik. Pemberian suara sebuah organisasi peserta pemilu pada lainnya yang dipraktikkan pada masa lalu misalnya

apapun motif yang mendasarinya, menjadi sebuah praktik politik yang dengan sendirinya dapat disahkan karena penonjolan ciri kekeluargaan. "Kemitraan politik", daripada kontrol, membukakan jalan bagi pembekalan anggota DPR oleh lembaga yang diprakarsai oleh eksekutif. Sebuah praktik budaya politik yang kelihatannya janggal dalam pemikiran Barat tentang Demokrasi namun menjadi mudah dimengerti dalam perspektif negara mengambang Orde Baru.

Demokrasi Sebagai Sebuah Konsepsi Politik Global

Sebagai sebuah konsepsi politik, demokrasi dapat dilihat dari berbagai dimensi. Dalam makna yang demikian ini, menjadi mudah dimengerti mengapa terdapat begitu banyak definisi tentang demokrasi.¹¹ Dalam pengertian yang paling klasik¹², demokrasi sekurang-kurangnya diartikan sebagai "pemerintahan dari, oleh

¹¹ Dalam bentuk yang paling mutakhir, tulisan-tulisan yang membahas demokrasi bahkan telah membayangkan demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang mengintegrasikan negara-negara bangsa pada tingkat global dengan sebutan *cosmopolitant model* (Held, 1996). Perspektif yang lain, membayangkan demokrasi sebagai institusi yang tidak terpisahkan dari ekonomi pasar global dengan sebutan *inclusive democracy* (Gezerlis, 2003).

¹² Dalam konsepsi yang paling klasik, gagasan tentang demokrasi telah muncul dalam pikiran Plato ketika membayangkan bagaimana kemaslahatan publik itu semestinya dimaterialisasikan dalam negara

dan untuk rakyat". Dalam perkembangannya, definisi ini akhirnya harus menerima 'masukan' prinsip perwakilan—sesuatu yang sebenarnya dengan enggan harus diterima kemudian karena alasan pengawasan langsung menjadi hampir tidak mungkin dikerjakan dalam masyarakat yang relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan masyarakat di negara-negara kota dari mana konsep demokrasi itu dilahirkan. Sejak saat itu prinsip perwakilan merupakan hal yang melekat dalam demokrasi.

Prinsip perwakilan sebagaimana dimengerti sekarang sesungguhnya juga telah mengalami sejarah perkembangan yang panjang (lihat Held, 1993). Dalam masyarakat demokratis pra-kapitalis, prinsip perwakilan hanya merujuk pada sejumlah kelompok kecil masyarakat. Walaupun terdapat pemilihan wakil-wakil 'rakyat', sesungguhnya yang memiliki hak memilih dan dipilih hanyalah terbatas pada kelompok bangsawan dan pemilik tanah. Itu pun sering hanya untuk menghasilkan parlemen yang sampai batas-batas tertentu tidak lebih dari sekedar sebagai pendamping kekuasaan para raja. Di Eropa, dua kelompok masyarakat inilah yang sampai pada akhir Abad-18 menjadi klas sosial yang secara eksklusif memiliki *priviledge* dalam sistem perwakilan.

Hanya menjelang peralihan Abad ke-20 belakangan ini prinsip perwakilan semacam itu mengalami

perwakilan pada akhirnya juga mencakup rakyat dalam arti yang lebih luas. Tidak saja para pemilik modal, tuan tanah, dan bangsawan, namun juga rakyat 'biasa', seperti buruh misalnya, dapat memiliki hak pilih dan dipilih. Hingga pertengahan abad ini, prinsip itu didorong lebih jauh untuk kemudian juga mencakup wanita dan kelompok-kelompok minoritas yang sebelumnya dianggap menjadi warga negara klas kedua.

Perubahan yang digambarkan sebelumnya merupakan serangkaian peristiwa sosial yang digerakkan oleh berbagai kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan bahkan teknologi, yang berjalan secara gradual dan saling bertemali. Pemahaman terhadap pergeseran makna perwakilan dalam demokrasi jelas hanya mungkin dipahami dengan memuaskan apabila terdapat perhatian yang memadai terhadap perkembangan sejarah. Sebuah perkembangan sejarah yang didorong oleh kekuatan-kekuatan nyata dalam masyarakat yang akarnya bahkan mungkin harus dirujuk beberapa ratus tahun sebelumnya. Berbagai peristiwa sejarah penting yang terjadi pada peralihan milenium yang lalu, seperti berdirinya universitas modern pertama di Salerno, Itali, pada Abad ke-9 yang kemudian disusul dengan berdirinya Universitas Paris pada 1150 dan beberapa universitas di belahan Utara lainnya seperti Oxford dan Cambridge di akhir Abad ke-12, merupakan

menyumbangkan terjadinya reformasi intelektual di Abad Pertengahan. Sebuah perubahan yang kemudian ikut memberikan sumbangan dalam peletakan dasar-dasar penting bagi terjadinya Revolusi Industri yang pada ujung-ujungnya melahirkan liberalisasi ekonomi, politik dan budaya; pada awalnya di Eropa, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia lainnya.

Ketika parlementarisme menjadi *mode of politics* dalam demokrasi yang dikembangkan oleh masyarakat Eropa pada Abad ke-18 dan ke-19, terdapat sejumlah pertanyaan-pertanyaan besar yang diajukan oleh publik tentang isu kedaulatan rakyat. Pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah yang disebut dengan 'rakyat', atau 'perwakilan dan keterwakilan rakyat', dan semacamnya, menggerogoti kepercayaan-kepercayaan orang tentang apakah parlementarisme dalam kenyataannya merupakan ideal dari demokrasi. Persoalan ini menjadi mengedepan ketika apa yang dibayangkan oleh parlementarisme ketika itu sesungguhnya tak lebih dari demokrasi yang sangat elitis karena hanya melibatkan sebagian golongan masyarakat kecil saja.

Gerakan-gerakan yang lebih populis yang inisiatifnya diambil oleh klas menengah, utamanya kelompok intelektual, yang berkoalisi dengan kelompok tertindas, utamanya buruh industri dan petani miskin sepanjang abad itu, telah menggoyahkan kepercayaan sebagian orang terhadap praktik demokrasi. Hilangnya dari

pergolakan yang lama itu pada akhirnya menghasilkan koreksi yang mendasar terhadap demokrasi parlementarisme. Tidak saja berkembang kepercayaan baru bahwa apa yang dimaksud dalam konsep 'rakyat' dan 'perwakilan' harus menyertakan proses-proses demokrasi yang adil bagi semua orang, namun juga kepercayaan bahwa pada akhirnya demokrasi hanyalah bermakna apabila pengakuan terhadap hak-hak sipil individu itu diberikan dan dihormati.

Dalam konteks sejarah yang demikian inilah kemudian terlahir konsep *civil liberties* melengkapi parlementarisme dalam usaha membangun demokrasi yang sesungguhnya. Dengan demikian, masalah demokrasi tidak lagi dipandang sebagai sekedar persoalan ada tidaknya (atau berfungsi tidaknya) parlemen namun juga ada tidaknya pengakuan terhadap hak-hak individu untuk ikut menentukan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Terdapat pergeseran yang sangat mendasar tentang bagaimana kemudian demokrasi itu dipraktikkan: dari orientasinya yang kuat kepada parlementarisme elite menuju parlementarisme populis dan pengakuan terhadap *civil liberties*. Mengikuti pandangan yang demikian itu, demokrasi diartikan tidak saja tersedianya parlemen, partai-partai politik berikut pemilihan umum yang adil dan jujur, namun juga pengakuan terhadap hak-hak individu, baik secara

sendiri-sendiri maupun kelompok, untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya dan secara langsung berpartisipasi dalam usaha mempengaruhi proses pembuatan keputusan publik.

Tumbuhnya tradisi berpartai dan berorganisasi politik, termasuk di dalamnya mendirikan organisasi-organisasi kepentingan dan pers bebas, sesungguhnya merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang amat khusus. Tradisi itu jelas mengambil jalur yang berbeda dari tradisi parlementarisme awal sebagaimana digambarkan di muka tadi. Sementara parlementarisme digerakkan oleh kepentingan-kepentingan elite, khususnya pemilik tanah, modal dan golongan bangsawan, *civil liberties* lebih banyak dihasilkan oleh perjuangan kelompok yang tertindas dan kelompok-kelompok lainnya yang merasa terancam oleh kuatnya praktik demokrasi elitis. Inilah apa yang oleh banyak para ahli sejarah dan ilmu-ilmu sosial dilihat sebagai sumbangan terpenting dari aliansi golongan kelas menengah dan bawah terhadap demokrasi moderen (Sparringa, 2001).

Sebagai konsep maupun praktik, demokrasi terus mengalami perubahan. Walaupun demokrasi moderen yang dikembangkan sejak ajaran tentang "Kontrak Sosial" dan "*Trias Politica*" hingga Abad-19 telah meletakkan dasar-dasar penting bagi tema-tema kunci di sekitar 'kedaulatan

supermasi hukum, penghalusan demokrasi pada kenyataannya terus berlangsung hingga awal abad-20. Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditandai oleh hadirnya pemilihan yang jujur untuk menentukan wakil-wakil rakyat melalui partai politik, dalam perkembangannya tak luput dari berbagai koreksi. Prinsip 'mayoritas melalui pemilihan umum' (yang dalam banyak tulisan lain sering juga disebut dengan *majority rule*) secara ideal memang dapat memberikan jaminan terhadap dihormatinya prinsip 'rakyat berdaulat'.

Namun terdapat persoalan besar ketika masyarakat berkembang menuju masyarakat yang lebih kompleks dan plural. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong revolusi industri dan komunikasi tidak hanya mengakibatkan berkembangnya kepentingan-kepentingan khusus yang dilahirkan oleh spesialisasi dan diversifikasi sosial, namun juga telah mengakibatkan masyarakat menjadi lebih heterogen dalam artian sosial dan budaya. Bergabungnya masyarakat-masyarakat lokal ke dalam satuan-satuan negara nasional yang terjadi awal hingga pertengahan Abad 20 merupakan ilustrasi yang baik untuk menggambarkan kecenderungan itu.

Apabila prinsip 'mayoritas melalui pemilu' pada awalnya dapat menyelesaikan hampir seluruh persoalan yang berdimensi kekuasaan negara dan rakyat, tidak lagi demikian

pengertian itu dihadapkan oleh kenyataan kemajemukan sosial dan budaya. Dengan kata lain, apabila pada awalnya pemenang pemilu dengan sendirinya dapat dipandang sebagai wakil sah dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan menurut mandat rakyat yang diwakilinya, maka tidak demikian halnya ketika pemilihan umum selalu menyisakan sebagian kelompok masyarakat minoritas dalam artian sosial, budaya, politik dan ideologis sebagai akibat dari proses-proses sosial dan sejarah yang digambarkan tadi.

Dalam arti yang demikian itu, demokrasi mendapat dua ruh barunya: pluralisme (pengakuan terhadap keragaman) dan toleransi (penghargaan terhadap keragaman). Prinsip mayoritas melalui pemilihan umum tanpa disokong oleh pluralisme hanyalah akan membawa demokrasi ke dalam Fasisme. Munculnya Hitler dengan Partai Nazi-nya merupakan contoh yang baik untuk memperlihatkan bagaimana demokrasi yang mengandalkan pada prinsip 'mayoritas melalui pemilihan umum' semata akan melahirkan Fasisme. Sementara diabaikannya penghargaan terhadap perbedaan hanya akan melahirkan chaos dan anarki. Sampai batas-batas tertentu, India merupakan contoh yang cukup baik untuk memperlihatkan bagaimana demokrasi yang bertumpu pada pluralisme tanpa toleransi hanya akan melahirkan instabilitas dan bahkan kekerasan.

Negara-negara bekas jajahan yang memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II merupakan contoh yang ideal untuk menggambarkan rumitnya pertalian sosial dan budaya dari sebuah masyarakat—sebuah keadaan yang kian mendesakkan kebutuhan akan pentingnya pluralisme dan toleransi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Negara-negara ini memiliki ciri yang amat spesifik: mereka dibangun bukan pertama-tama atas kesamaan budaya seperti ras, etnik, atau bahasa, melainkan oleh kesamaan pengalaman sejarah semata-mata. Dalam konteks Indonesia, sebenarnya tidak ada alasan objektif mengapa orang-orang di Aceh, Kalimantan, Flores, atau Irian misalnya, untuk menjadi satu bangsa yang disebut Indonesia. Tidak saja mereka berbeda dalam bahasa, adat dan tradisi namun sering juga bahkan ras dan agama—sebuah kombinasi perbedaan yang sering melahirkan perpecahan daripada persatuan. Apabila dalam kenyataannya kemudian 'masyarakat-masyarakat lokal' dari Sabang hingga Merauke itu menyatakan diri sebagai anggota dari sebuah 'nasion' baru, Indonesia, jelas itu karena didorong oleh kepercayaan dan tekad untuk bersatu. Sebuah nasionalisme spesifik yang menurut asalnya sangat berbeda dengan nasionalisme masyarakat Eropa yang dibangun sebelumnya.

Implikasi dari keadaan yang digambarkan tadi adalah, demokrasi

hubungan *state* (negara) dan *civil society* (masyarakat), namun juga soal hubungan *civil-civil society* (lihat Suparian, 2004). Sementara yang pertama (*state-civil society*) membicarakan soal bagaimana masyarakat mempunyai akses yang memadai untuk mengontrol bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh negara, yang kedua (*civil-civil society*) menyangkut soal bagaimana kelompok-kelompok dalam masyarakat mampu melihat perbedaan-perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang tidak saja harus diakui namun juga dihormati keberadaannya. Cara melihat demokrasi semacam ini tidak saja mensyaratkan adanya pemerintahan yang dapat dikontrol oleh rakyatnya (baik melalui parlemen maupun institusi demokrasi lainnya seperti misalnya kelompok-kelompok kepentingan) namun juga mensyaratkan tersedianya kesadaran-kesadaran baru di kalangan masyarakat sendiri untuk memperlakukan demokrasi baik sebagai tujuan maupun cara. Tumbuhnya kapital sosial (*social capital*) yang memungkinkan elemen-elemen strategis dalam *civil society* mengembangkan kesadaran untuk mengutamakan dialog atas dasar hasrat dan kepercayaan yang besar pada sebuah kehidupan kolektif, misalnya, adalah sebuah institusi penting dalam sebuah nasyon dan demokrasi.

Tersedianya forum dan media yang memungkinkan masyarakat mengem-

sozial yang diperlukan untuk melihat perbedaan dan atau konflik sebagai sesuatu yang wajar, merupakan sebuah keharusan politik dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Hadirnya organisasi-organisasi massa dan pers yang efektif, misalnya, merupakan institusi sosial yang amat sentral tidak saja bagi usaha untuk menjamin kebebasan berekspresi namun sekaligus penting untuk menumbuhkan kepercayaan (*trust*) bahwa semua warga negara memiliki tanggung jawab sosial untuk memajukan kehidupan bersama. Dengan demikian, perbedaan menjadi sesuatu yang memperkaya daripada sesuatu yang menghancurkan.

Prinsip-prinsip 'mayoritas melalui pemilihan umum', 'pluralisme', dan 'toleransi' sesungguhnya dapat dipandang sebagai satu-satunya alternatif yang sah untuk memungkinkan individu-individu, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka dalam cara dan tujuan yang demokratis. Dalam pengertian yang demikian ini, demokrasi tidak hanya mensyaratkan cara atau prosedur untuk mencapai tujuan tetapi juga tujuan akhir itu sendiri. Cara dan tujuan merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan dalam nilai dan praktik demokrasi. Membayangkan demokrasi dapat dicapai hanya dengan menegakkan prinsip 'mayoritas melalui pemilu'

yang ganjil. Selain tidak memperoleh dasar moral yang cukup kuat, demokrasi semacam itu hanya akan melahirkan praktik-praktik politik yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Sistem politik yang secara keseluruhan menjunjung tinggi ketiga prinsip demokrasi sejati: 'mayoritas melalui pemilihan umum', 'pluralisme (pengakuan terhadap keragaman) dan toleransi (penghargaan terhadap keragaman) pada akhirnya merupakan jawaban terhadap berbagai persoalan yang dihasilkan oleh sebuah masyarakat moderen yang majemuk seperti Indonesia.

Sebagai sebuah konsepsi politik yang dikembangkan melalui proses sejarah yang panjang, demokrasi dan negara-bangsa (*nation state*) adalah dua hal yang mencerminkan penemuan moderen (*moderen invention*) yang bertumpu pada kepercayaan universal bahwa demokrasi akan memperkuat eksistensi negara-bangsa. Walaupun demikian, itu tidak berarti bahwa demokrasi yang memberi tempat penting bagi perbedaan itu dengan serta-merta akan memperkuat landasan negara bangsa. Terdapat sejumlah syarat untuk itu. Demokrasi yang memberi ruang bagi perbedaan itu pada dasarnya hanya akan berguna bagi kepentingan penguatan negara-bangsa apabila peluang itu dipakai semata-mata untuk memperdebatkan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan kolektif berdasarkan prinsip atau nilai yang

disepakati bersama. Apabila ruang itu juga digunakan untuk memperdebatkan bangunan dasar dan tujuan kolektif yang bersifat fundamental maka demokrasi hanya akan menghancurkan negara-bangsa. Karena itu, diperlukan kesepakatan kolektif yang kokoh tentang apa yang menjadi dasar bangunan dan tujuan dari sebuah negara-bangsa untuk membuat demokrasi berguna bagi kehidupan bersama. Pada tempat inilah, reformasi untuk demokrasi di Indonesia memiliki tantangan yang bersifat khusus, yakni di satu pihak melanjutkan pembangunan kelembagaan politik di tingkat negara dan di pihak lain melakukan transformasi sosial yang diperlukan agar terdapat kualitas *civil society* yang dapat menyokong usaha untuk memperkuat gagasan moderen tentang negara bangsa Indonesia.

Tantangan lain yang juga mengedepan dan tak boleh diremehkan adalah hadirnya globalisasi yang memiliki logika politik dan ekonominya sendiri yang tidak sepenuhnya sejajar dengan kepentingan untuk memelihara hubungan yang saling memperkuat di antara demokrasi dan negara-bangsa. Walaupun tema ini sedikit menjauh dari pokok bahasan tulisan ini, sangat penting di sini untuk dikemukakan bahwa globalisasi telah mengubah, sekurang-kurangnya mengancam, sebagian ajaran dan nilai-nilai esensial dalam konsepsi politik tentang negara-bangsa. Tema ini mendominasi perdebatan di kalangan ahli ilmu sosial

sejak awal 90-an. Pokok perdebatannya terletak di sekitar pertanyaan mendasar tentang adakah gagasan negara-bangsa itu masih relevan dengan meluasnya dan menguatnya proses pengintegrasian secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam sebuah tataran global *beyond nation state*.

Dalam pemahaman sosiologi politik saya, Indonesia memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk membuat reposisi yang lebih jelas tentang bagaimana negeri ini harus merespon gagasan-gagasan besar tentang demokrasi dan globalisasi di satu pihak dan di pihak lain melanjutkan perjalanan untuk menyempurnakan dan memperkuat gagasan negara bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh para tokoh pergerakan nasional pada abad yang lalu.

Acuan Kepustakaan

- Ackerman, Bruce
1992 *The Future of Liberal Revolution*. New Haven: Yale University Press
- Aspinall, Edward
1996 "The Broadening Base of Political Opposition in Indonesia", in Garry Rodan (ed.), *Political Opposition in Industrialising Asia*, London: Routledge
- Baker, Gideon
2002 *Civil Society and Democratic Theory: Alternative Voices*.
- Bernhard, Michael
1993 "Civil Society and Democratic Transition in East Central Europe", *Political Science Quarterly*, 108, 2: 307-326.
- Birch, Anthony H.
1993 *The Concepts and Theories of Modern Democracy*. London: Routledge.
- Blaney, David L. and Mustapha Pasha
2004 *Civil Society and Democracy in the Third World*
- Bouchier, David
1996 *Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia* (a Ph.D Thesis), Monash University
1997 "Totalitarian and the 'National Personality': Recent Controversy about the Philosophical Basis of the Indonesian State", dalam Jim Schiller, and Barbara Martin-Schiller (eds.), *Imagining Indonesia: Cultural Politics and Political Culture*, Ohio: Ohio University Press.
- Cohen, Robin, and Paul Kennedy
2001 *Global Sociology*. New York: Palgrave.
- CSIS
1976 *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS.
- Dahrendorf, Ralf
2001 "Can European Democracy Survive Globalization?" *The National Interest*, 20: 11-20.
- Di Palma, Giuseppe
1990 *To Craft Democracies*, Berke-

- 1991 "Why Democracy Can Work in Eastern Europe", *Journal of Democracy*, Winter: 24-45.
- Dryzek, John S. and Jeffrey Berejikian
2004 "Reconstructive Democratic Theory". *American Political Science Review*, 87, 1: 48-87.
- Etzioni, Eva and Halevy
1993 *Problems and Potential of Western Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Fotopoulos, Takis
2002 "Transitional Strategies and the Inclusive Democracy Project", *Democracy & Nature*, 8, 1: 17-62.
- Gezerlis, Alexandros
2003 "The Inclusive Democracy Project – Six Years On", *Democracy & Nature*, 93: 4-12
- Held, David
1993 "Democracy from City-States to Cosmopolitan Order", dalam David Held (Ed.), *Prospects for Democracy*, Cambridge: Polity Press
1995 *Democracy and Global Order: from the Modern States to Cosmopolitan Governance*. Cambridge: Polity.
1996 *Models of Democracy*. Stanford: Stanford University Press
- Heryanto, Ariel
1988 "Development of Development", *Indonesia*, October: 1-24.;
1996 "Indonesian Middle-Class
- Garry Rodan (ed.), *Political Opposition in Industrialising Asia*. London: Routledge
- Huntington, Samuel P.
1984 "Will More Countries Become Democratic?". *Political Science Quarterly*, 99: 212-236
1991 *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
1991 "How Countries Democratize", *Political Science Quarterly*, 106, 4: 579-615.
- Karl, Terry Lynn
1990 "Dilemmas of Democratization in Latin America", *Comparative Politics*, 23, 6: 327.
- Liz, Juan
1990 "Transition to Democracy", *Washington Monthly*. 13:34-50
- McColm, Bruce R.
1993 "The Comparative Survey of Freedom". *Freedom Review*, 3: 12-34.
- Morfit
1986 "Pancasila Orthodoxy" dalam C. MacAndrews (ed), *Central Government and Local Government in Indonesia*, Singapore: Oxford University Press.
- Neocleous, M.
1995 "From Civil Society to the Social", *British Journal of Sociology*, 46: 395-408;

- Nussbaum, Frederick
1983 *The Triumph of Science and Reason 1660-1685*, New York: Harper Torchbooks.
- Pabotinggi, Mochtar
1995 "Indonesia: Historicising the New Order's Legitimacy Dillema", dalam *Alagappa, Political Legitimacy in Southeast Asia: the Quest for Moral Authority*, Stanford: Standford University Press.
- Pinkney, Robert
1994 *Democracy in the Third World*. Colorado: Linney Rienner Publishers.
- Plato
1974 *The Republic*. Harmondsworth: Penguin.
- Poulantzas, Nicolas
1972 "The Problem of Capital State", dalam Blackburn, R., (ed.), *Ideology in Social Science*, New York: Pantheon Books
1978 *State, Power, Socialism*. London: New Left Books.
- Przeworski, Adam
1996 "What Makes Democracy Endure?". *Journal of Democracy*, 7, 1: 39-55.
- Ramage
1993 *Ideological Discourse in the Indonesian New Order: State Ideology and the Beliefs of an Elite, 1985-1993* (a Ph.D Thesis). University of South
- Remmer, Karren L.
1995 "New Theoretical Perspective on Democratization". *Comparative Politics*, 28, 1: 103-122.
- Roberts, C
1991 *The Idea of Civil Society*, Research Triangle Park. N.C.: National Humanities Center
- Sin, Doh Chull
1994 "On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Evaluation of Recent Theory and Research". *World Politics*, 47, 1: 135-170.
- Soepomo
T.T. *Risalah Sidang BPUPKI / PPKI*, dalam sidang BPUPKI: SETNEG, Jakarta: SETNEG.
- Sparringa, Daniel
1997a *Discourse, Democracy and Intellectuals in New Order Indonesia* (a Ph.D Thesis), The Flinders University of South Australia
1997b *Politik Orde Baru Pasca Pemilu 1997* (working paper Laboratorium Masalah-masalah Pembangunan), FISIP Universitas Airlangga
1997c *Orde Baru dan Politik Massa* (working paper, Laboratorium Masalah-masalah Pembangunan), FISIP Universitas Airlangga.
1998 *Orde Baru dan Hegemoni sebagai Sebuah Kepemimpinan Moral dan Intelektual* (working paper, Laboratorium

ngunan) FISIP Universitas Airlangga.

Panggung Orde Baru, Bandung: Mizan, hlm. 223-245.

2001 *Intelektual dan Gerakan Pembaharuan dalam Demokrasi Moderen* (working paper, Laboratorium Masalah-masalah Pembangunan), FISIP Universitas Airlangga.

van Niel, V.

1984 *The Emergence of the Moderen Elite*, Dordrecht-Holland: Foris Publication

2001 *Negara, Universitas, Intelektual dan Politik* (working paper, Laboratorium Masalah-masalah Pembangunan) FISIP Universitas Airlangga.

Suparlan, Parsudi

2004 *Hubungan Antar-Sukubangsa*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPIK).

Uhlir, Anders

2004 "Transnational Democracy Diffusion and Indonesian Democracy Discourses". *Third World Quarterly*, 14, 3: 517-544.

van M. Langenberg

1990 "The New Order State: Language, Ideology, Hegemony", dalam Arief Budiman (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, Clayton: Center of Southeast Asian Studies, Monash University, hlm. 22-124

1996 "Negara Orde Baru: Bahasa, Ideologi dan Hegemoni", dalam Latif, Y. and Ibrahim, I. (eds.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di*